



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BALONG
TAHUN 2022**



**KECAMATAN BALONG
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG

JL.Pemuda Nomor 4.F Telephone (0352) 371 266 Kode Pos 63461
Website : <https://balong.ponorogo.go.id> Email : kecamatanbalong@gmail.com

BALONG

KEPUTUSAN CAMAT BALONG KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4/ 12 /405.30.11/ 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BALONG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 -2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;

21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Balong Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2022
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 .

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2022 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 .

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
(Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan)
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Ponorogo

Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

CAMAT BALONG



SETYA ANTARI, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19710110 199101 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2022 . Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2022 .

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balong ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Balong. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Balong Tahun 2022 .

Balong, 22 Oktober 2021

CAMAT BALONG



SETYA ANTARI, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19710110 199101 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
TC 29	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
TC 30	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4 Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
TC 31	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
TC 32	43
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
3.3 Program dan Kegiatan	46
TC 33	49
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB IV : PENUTUP	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Balong dalam rangka mencapai “**MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)**” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra

Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

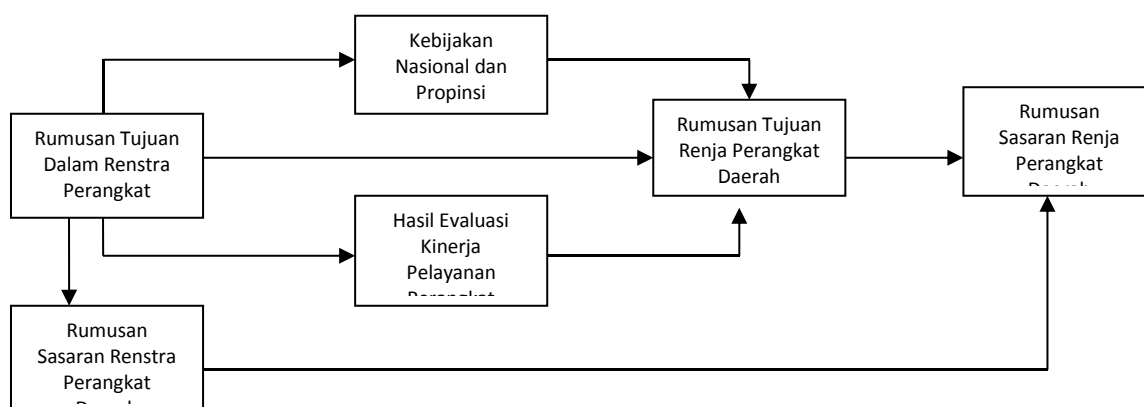
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Balong

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama ;
21. Keputusan Camat Balong Nomor : 188/06/405.30.11/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2021 -2026.
22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2022 adalah
 - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balong Tahun 2022 ;
 - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Balong pada Tahun 2022 .
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balong tahun 2022 adalah :
 - Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Balong Tahun 2022 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2022 .

- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Sebagai Dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah
- Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kecamatan Balong

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Balong dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Balong tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah , proses penyusunan Renja Perangkat Daerah , keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah .

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah , serta susunan garis besar isi.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Balong Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goal s);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah .

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Kecamatan Balong tahun 2022 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Dalam Kabupaten Ponorogo. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

1. Tugas :

Adapun Tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Balong tahun 2022 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Balong, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balong antara lain :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pelayanan administrasi Perkantoran yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kegiatan ini berupa : Pembayaran rekening telephon, air dan listrik.

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon .dengan rencana sebanyak 12 Laporan dan realisasi sebanyak 12 Laporan

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 5.058.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.962.359,- atau 98,11 %.

b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan

Kegiatan ini berupa : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Juru Bayar / Gaji), .

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan dengan rencana sebanyak 5 Orang dan realisasi sebanyak 5 Orang

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 28.400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 28.400.000,- atau 100 %;

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa : Honor Petugas Kebersihan (2 orang)

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Jasa Kebersihan dengan rencana sebanyak 2 Orang dan realisasi sebanyak 2 Orang. Dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang di beli dengan rencana 1 Paket dan terealisasi sebanyak 1 Paket

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 20.597.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 20.597.500,- atau 100 %.

d. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini berupa : Belanja Alat Listrik dan Elektronik(lampu pijar, baterai kering)

Indikator kegiatan ini adalah : Jumlah kompen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor dengan rencana sebanyak 1 paket dengan realisasi sebanyak 1 paket

Dana yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp.1.474.600,- Dapat terealisasi sebesar Rp 1.474.600,- atau 100%

e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini berupa : Belanja Mamin pegawai dan mamin rapat.

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah penerima belanja makanan dan minuman dengan rencana sebanyak 70 Orang dan realisasi sebanyak 70 Orang

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 46.670.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 46.660.000,- atau 99,98 %.

f. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini berupa : Belanja BBM, Belanja ATK, Belanja Foto Copy dan penjilidan

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan rencana sebanyak 850 Surat dan terealisasi sebanyak 1063 surat

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 16.344.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 16.343.000,- atau 99,99 %.

- g. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga

Kegiatan ini berupa : Service Komputer dan Printer

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dengan rencana sebanyak 5 Unit dan realisasi sebanyak 5 Unit

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 3.396.200,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3,367.700,- atau 99,16 %.

- h. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan dengan rencana sebanyak 5 Kali terealisasi sebanyak 5 kali

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 14.826.000,- atau 98,84 %.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini berupa : Jasa Service, Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Pembelian bahan bakar minyak .

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, dengan rencana sebanyak 6 Unit dan realisasi sebanyak 6 Unit

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 21,238,330,- dapat terealisasi sebesar Rp. 21,237,838,- atau 100 %.

- b. Kegiatan Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas

Kegiatan ini berupa : Belanja Modal Peralatan dan mesin (Laptop dan Printer) dan Tempat Parkir

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga yang dibeli dengan rencana sebanyak 3 Unit dan dapat terelalisasi sebanyak 3 unit

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 55.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 55.000.000,- atau 100%

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yaitu :

- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya:

Kegiatan ini berupa : Belanja Pakaian Dinas (PDH) untuk Karyawan Karyawati Kantor Camat Balong.

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dengan Rencana 21 Orang terealisasi 21 Orang.

Dana yang dianggarkan untuk Tahun 2020 sebesar Rp. 7.350.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.7.350.000,- atau 100%

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa : Belanja makanan dan minuman rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun, dengan rencana sebanyak 20 Dokumen terealisasi sebanyak 20 Dokumen

Dana Yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp. 800.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 800.000,- atau 100%

b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun dengan rencana 4 Dokumen dan dapat terealisasi 4 Dokumen

Dana yang dianggarkan tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 800.000,- atau 100%

c. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan rencana 8 Dokumen dan dapat terealisasi sebanyak 8 Dokumen

Dana yang dianggarkan tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 800.000,- atau 100%

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja Foto Copy, Belanja Pejilidan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah SPP yang diterbitkan dengan rencana 1 SPP dapat terealisasi 1 SPP/SOP dan Jumlah SOP yang diterbitkan dengan target 41 SOP dapat terealisasi 41 SOP

Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Kegiatan Fasilitasi penyusunan program kerja dan pembinaan ke desa/kelurahan
Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium Kapolsek dan Dan Ramil , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kesenian/ soundsystem, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Transport Lokal PNS untuk Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Covid-19
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa sasaran sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan rencana sebanyak 20 Desa dan realisasi sebanyak 20 Desa
Dana yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp. 37.750.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 37.750.000,- atau 100%
- b. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah PKK Aktif dengan rencana 20 Kelompok PKK Desa terealisasi sebanyak 20 Kelompok PKK Desa
Dana yang dianggarkan dalam Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.800.000,- Terealisasi sebesar Rp 4.800.000,- atau 100 %
- c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja Makanan dan minuman rapat
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah desa yang menyusun peraturan Desa dan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa dengan rencana 20 Desa dapat terealisasi 20 Desa
Dana yang dianggarkan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100%
- d. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, dan Belanja Transport local
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan dengan rencana 20 Desa dapat terealisasi 20 Desa

Dana yang dianggarkan Tahun 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.500.000,- atau 100%

- e. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa dapat terealisasi sebanyak 20 Desa dengan target 20 Desa

Dana yang dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%

- f. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang dengan rencana sebanyak 20 Desa dan realisasi sebanyak 20 Desa

Dana yang dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.600.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100%

- g. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berupa : Belanja Mamin Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Penanganan gangguan Trantibum dengan rencana 1 Kasus dan dapat terealisasi 1 Kasus

Dana yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.025.000,- atau 100%

- h. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Kegiatan ini berupa : Pelaksanaan kegiatan Grebeg suro dan kegiatan Hari Jadi Kab. Ponorogo

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah even kesenian daerah dan kebudayaan yang diikuti dengan rencana 2 Event tidak dapat terealisasi 2 Event karena Anggaran ini semua dialihkan untuk penanganan Wabah Pandemi Covid 19 di Kabupaten Ponorogo.

- i. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI
Kegiatan ini berupa : Belanja Mamin Tamu,
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI yang direncanakan sebanyak 1 Event dan dapat terealisasi sebanyak event. Hanya pelaksanaan sujud syukur
Dana yang dianggarkan untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp. .550.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.550.000,- atau 100%.
- j. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, dan Belanja Mamin Tamu.
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pokja Desa yang terbentuk, dengan rencana 20 Desa dapat terealisasi sebanyak 20 Desa
Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 7.516.700,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7.516.700,- atau 100 %
- k. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)
Anggaran kegiatan ini difokuskan untuk penanganan wabah pandemi covid 19 di Kabupaten Ponorogo
- l. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Anggaran kegiatan ini difokuskan untuk penanganan wabah pandemi covid 19 di Kabupaten Ponorogo
- m. Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan minuman rapat
Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun dengan rencana 70 Dokumen dan realisasinya 70 Dokumen
Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%

- n. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Anggaran kegiatan ini difokuskan untuk penanganan wabah pandemi covid 19 di Kabupaten Ponorogo

- o. Kegiatan Fasilitas kerukunan umat beragama
Kegiatan ini berupa : Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembelian ATK, Belanja Mamin Rapat
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Kasus SARA dengan target 1 Kasus, di Kecamatan Balong tidak ada kasus sara sehingga bisa disimpulkan bahwa Kecamatan Balong dalam keadaan aman terkendali, sehingga bisa dikatakan capaiannya 100%
Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 96.835.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.96.835.000,- atau 100%.

Adapun lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel TC 29 berikut ini :

TABEL TC 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2016 & 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi		100	100%	96,72%	96,72%			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk kekluar yang dikelola		2.976 Surat						
4.01 . 4.01.15 . 01 . 21	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang tersedia			850 Surat	1063 Surat	125,05%			
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon		36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki			3 item	3 item	100,00%			

4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah Penerima jasa administrasi Keuangan		15 Orang	5 Orang	5 Orang	100,00%			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan		5 Orang						
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan		6 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00%			
	Penyediaan Perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki		6 item	3 item	3 item	100,00%			
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli		2 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%			
	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah Barang cetakan dan pengadaan yang tersedia		1 Paket						
	Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Atap Tulis Kantor Barag cetakan dan pengadaan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kompen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		3 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%			
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		13 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman		63 Orang	21 Orang	21 Orang	100,00%			
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan								
4.01 . 4.01.15 . 01 . 27	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan		23 Rakor	21 Rakor	21 Rakor	100,00%			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi dan teknis kegiatan		2 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi		100%	100%	100%	10%			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		2 Item	1 Item	1 Item	100,00%			

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara		2 Item	1 Item	1 Item	100,00%			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara		2 Item	1 Item	1 Item	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 02 . 53	Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga yang dibeli		13 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00%			
	Pengadaan mebeleur gedung kantor, rumah jabatan/Dinas dan sarana prasarana kerja aparatur	Jumlah mebelair gedung kantor, rumah jabatan/Dinas dan sarana prasarana kerja aparatur yang dibeli								
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		3 item	3 item	3 item	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 02 . 46	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Penerima Pakaian khusus hari hari tertentu								
4.01 . 4.01.15 . 18	Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%			
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional/pakaian adat	Jumlah Penerima pakaian khusus hari hari tertentu		42 Orang		21 Orang	100,00%			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penerima Pakaian Dinas								
4.01 . 4.01.15 . 18 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		2 Orang		1 Orang	100,00%			
	Program Peningkatan Sumberdaya aparatur									
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat								

4.01 . 4.01.15 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100%	100%	100%	100%			
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun		24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun								
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 28	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat (SKM)		76,31	74,02	74,17	100,23			
4.01 . 4.01.15 . 28 . 01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah SPP/SOP yang diterbitkan		1 SPP/41 SOP	1 SPP/38 SOP	1SPP/SOP	100,00%			
	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			100%	100%	100%	100%			
	Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang menyusun produk hukum yang dievaluasi		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan ADD dan DD		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kec/Desa			100%	100%	100%	100%			
	Peningkatan Peranan Wanita / PKK	JUmlah Desa yang mengikuti kegiatan PKK		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang dibina dan disosialisasi		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Program Pengembangan Nilai Budaya			100%						
	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah event yang diikuti		3 Event						
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				100%	100%	100%			

	Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	Jumlah event yang diikuti		3 event	3 Event	3 Event	100,00%			
	Program Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%			
	Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	jumlah event yang diadakan		8 Event	4 Enent	4 Enent	100,00%			
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			100%	100%	100%	100%			
	Penyelenggaraan Lomba Desa / Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa di Tk. Kecamatan		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat(BBGRM)	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan BBGRM								
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	100%	100%	100%			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah	Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil dipungut dan disetor		100%	100%	100%	100,00%			
	Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT STTS PBB-P2	Prosentase SPPT STTS yang diverifikasi		100%	100%	100%	100,00%			
	Program Keberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan			100%	100%	100%	100%			
	Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah satuan keamanan dibentuk		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			100%	100%	100%	100%			
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Pokja Sehat		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	100%	100%			
	Penyelenggaraan Musrenbang Perangkat Daerah	Jumlah Dsa yang mengikuti musrenbang		20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%			

4.01 . 4.01.15 . 20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMnya			70%	80%	114,3			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 14	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 02	Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undang			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 12	Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong								
4.01 . 4.01.15 . 20 . 03	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK Aktif			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 03	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 05	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang			20 Desa	20 Desa	100,00%			
	Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil dipungut dan disetor			100%	100%	100,00%			
	Fasilitasi Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2	Prosentase SPPT dan STTS PBB-P2 yang diverifikasi			100%	100%	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan potensi gangguan trantibum			1 Kasus	0	0,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 117	Fasilitasi Pelaksanaan Kompetisi Olah Raga	Jumlah Event Olah Raga yang diikuti								

4.01 . 4.01.15 . 20 . 09	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah seni budaya aktif			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 10	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	Jumlah even yang diadakan			3 Event	3 Event	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 117	Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat	Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi			20 Desa	20 Desa	100,00%			
4.01 . 4.01.15 . 20 . 117	Fasilitasi Kegiatan FKUB	Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	17 Dokumen	17 Dokumen				17 Dokumen	17 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang Penerima	17 Orang Penerima				17 Orang Penerima	17 Orang Penerima	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan	4 Orang Penerima	4 Orang Penerima				4 Orang Penerima	4 Orang Penerima	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerimaa pakaian Dinas	20 Orang Penerima	20 Orang Penerima				21 Orang Penerima	21 Orang Penerima	100%
7.01.01.2.03	Administrasi Umum	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit				3 Unit	3 Unit	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Minuman Harian dan Jumlah ATK yang tersedia	20 Penerima 1 Paket	20 Penerima 1 Paket				20 Penerima 1 Paket	20 Penerima 1 Paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	5 Rakpr	5 Rakpr				5 Rakpr	5 Rakpr	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1420 Surat	1420 Surat				1420 Surat	1420 Surat	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kedatangan Dinas Operasional yang terpelihara	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	150 Responden	150 Responden				150 Responden	150 Responden	150 Responden
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif 3. Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 4. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja 20 Desa	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja 20 Desa				3 Event 20 Kelompok 20 Pokja 20 Desa	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja 20 Desa	100%

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun	100%	100%				100%	100%	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	1 SPP 41 SOP 210 surat	1 SPP 41 SOP 210 surat				1 SPP 41 SOP 210 surat	1 SPP 41 SOP 210 surat	100%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	100%				100%	100%	
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya	80%	80%				80%	80%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten	1 Desa 1 Desa	1 Desa 1 Desa				1 Desa 1 Desa	1 Desa 1 Desa	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa				20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	80%	80%				80%	80%	80%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi				3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	20 Desa	20 Desa				20 Desa	20 Desa	100%

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	60 Dokumen	60 Dokumen				60 Dokumen	60 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa				20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	100%
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerima Jasa klinik hukum	1 Orang Penerima	1 Orang Penerima				1 Orang Penerima	1 Orang Penerima	100%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor 4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT				1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	100%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	20 Desa	20 Desa				20 Desa	20 Desa	100%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	20 Kelompok	20 Kelompok				20 Kelompok	20 Kelompok	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Balong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Persentase jumlah surat /Rekomendasi yang diterbitkan terhadap yang diajukan;
- Prosentase Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa yang menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Desa dan Administrasi Pelaporan (SPJ) ADD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Balong memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Grebeg Suro; dan hari jadi
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;

8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Balong
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Balong seminggu sekali atau setiap kali sesuai kebutuhan
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Balong;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan, monitoring dan evaluasi secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;

4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Balong;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran bantuan kepada rumah tangga miskin ;
2. Monitoring penyaluran KIS;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah social dan Bencana Alam

TABEL TC 30												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balong												
Kabupaten Ponorogo												
NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah surat masuk kekluar yang dikelola											
	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang tersedia			850 surat				1165 Surat				
	Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon			12 Laporan				12 Laporan				
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki			5 Jenis				5 Jenis				

	Jumlah Penerima jasa administrasi Keuangan											
	Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan			5 Orang				5 Orang				
	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan			2 Orang				2 Orang				
	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki											
	Jumlah ATK yang dibeli											
	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia											
	Jumlah Atat Tulis Kantor Barag cetakan dan penggadaan											
	Jumlah kompen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor			1 Paket				1 Paket				
	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli											
	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman			21 Orang				21 Orang				
	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan			21 Rakor				21 Rakor				

	Jumlah Penerima Jasa Administrasi dan teknis kegiatan											
2	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi			100%				100%				
	Jumlah rumah dinas yang dipelihara											
	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara											
	Jumlah kendaraan yang dipelihara											
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga yang dibeli			3 Jenis				3 Jenis				
	Jumlah mebelair gedung kantor, rumah jabatan/Dinas dan sarana prasarana kerja aparatur yang dibeli			2 item				2 Item				
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			3 Item				3 Item				
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			3 Unit				3 Unit				
	Jumlah Penerima Pakaian khusus hari hari tertentu											

3	Prosentase Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu			100%				100%				
	Jumlah Penerima pakaian khusus hari hari tertentu			21 Orang				21 Orang				
	Jumlah penerima Pakaian Dinas			1 Orang				1 Orang				
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat											
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat											
4	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100%				100%				
	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun			8 Dokumen				8 Dokumen				
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun			4 Dokumen				4 Dokumen				
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			8 Dokumen				8 Dokumen				
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi											

	Jumlah SPP/SOP yang diterbitkan			1 SPP/SOP				1 SPP/SOP				
	Jumlah Desa yang menyusun produk hukum yang dievaluasi											
	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan ADD dan DD											
	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan PKK											
	Jumlah Desa yang dibina dan disosialisasi											
	Jumlah event yang diikuti											
	Jumlah event yang diikuti											
	jumlah event yang diadakan											
	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa di Tk. Kecamatan											

	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan BBGRM											
	Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil dipungut dan disetor											
	Prosentase SPPT STTS yang diverifikasi											
	Jumlah satuan keamanan dibentuk											
	Jumlah Pokja Sehat											
	Jumlah Dsa yang mengikuti musrenbang											
6	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMnya			70%				70%				
	Jumlah peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun			75 Dokumen				20 Desa				

Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undang			20 Desa				20 Desa				
Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan			20 Desa				20 Desa				
Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong											
Jumlah PKK Aktif			20 Desa				20 Desa				
Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa			20 Desa				20 Desa				
Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang			20 Desa				20 Desa				
Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil dipungut dan disetor			100%				100%				
Prosentase SPPT dan STTS PBB-P2 yang diverifikasi			100%				100%				
Jumlah penanganan gangguan trantibum			1 Kasus				1 Kasus				

	Jumlah Event Olah Raga yang diikuti											
	Jumlah Seni BUdaya aktif			20 Desa				20 Desa				
	Jumlah even yang diadakan			3 Event				3 Event				
	Jumlah Pokja sehat yang difasilitasi			20 Desa				20 Desa				
	Jumlah Fasilitas kegiatan keagamaan			30 fasilitas				10 Fasilitas				
1	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.1	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
1.1.2	Jumlah Dokumen Laporam Capaian Kinerja yang disusun				17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	
1.2.	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.2.1	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang Penerima	17 Orang Penerima	17 Orang Penerima		17 Orang Penerima	17 Orang Penerima	17 Orang Penerima	

1.2.2	Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan				4 Orang Penerima	4 Orang Penerima	4 Orang Penerima		4 Orang Penerima	5 Dokumen	5 Dokumen	
1.2.3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
1.3	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.3.1	Jumlah Penerimaa pakaian Dinas				21 Orang Penerima	20 Orang Penerima	20 Orang Penerima		21 Orang Penerima	21 Orang Penerima	21 Orang Penerima	
1.4	Prosentase Administrasi Umum Perengkat Daerah yang terpenuhi				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.4.1	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.4.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				3 Unit	1420 Surat	1420 Surat		3 Unit	3 Unit	3 Unit	
1.4.3	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah ATK yang tersedia				20 Penerima 1 Paket	20 Penerima 1 Paket	20 Penerima 1 Paket		20 Penerima 1 Paket	20 Penerima 1 Paket	20 Penerima 1 Paket	
1.4.4	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.4.5	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti				3 Rakpr	5 Rakpr	5 Rakpr		3 Rakpr	5 Rakpr	5 Rakpr	

1.5	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%		100%	1 Paket	1 Paket	
1.5.1	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola				1420 Surat	1420 Surat	1420 Surat		1455 Surat	1450 Surat	1450 Surat	
1.5.2	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
1.6	Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.6.1	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara				5 Unit	5 Unit	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5 Unit	
1.6.2	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki				5 Unit	5 Unit	5 Unit		3 Unit	5 Unit	5 Unit	
1.6.3	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	
2	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik				150 Responden	150 Responden	150 Responden		150 Responden	100%	100%	
2.1	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.1.1	1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif 3. Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 4. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam				3 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa		1 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa	3 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa	
2.2	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2.2.1	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP				1 SPP 41 SOP 210 surat	1 SPP 41 SOP 210 surat	1 SPP 41 SOP 210 surat		1 SPP 41 SOP 179 surat	1 SPP 41 SOP 210 surat	1 SPP 41 SOP 210 surat	
2.3	Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2.3.1	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara				2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	

3	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya				80%	85%	85%		85%	85%	100%	
3.1	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Loma Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten				1 Desa 1 Desa	1 Desa 1 Desa	1 Desa 1 Desa		1 Desa 1 Desa	1 Desa 1 Desa	1 Desa 1 Desa	
3.1.1	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong				20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa		20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa	20 Desa	
4	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya				80%	80%	80%		80%	80%	80%	
4.1	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
4.1.1	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi				11 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi		11 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	

4.1.2	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				20 Desa	20 Desa	20 Desa		20 Desa	20 Desa	20 Desa	
5	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5.1	Prosentase hasil Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.				100%	100%	100%		100%	80%	80%	
5.1.1	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun				60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	

5.1.2	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD				20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa		20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	
5.1.3	Jumlah Penerima Jasa klinik hukum				1 Penerima	1 Penerima	1 Penerima		1 Penerima	1 Penerima	1 Penerima	
5.1.4	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor 4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan				1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT		1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	
5.1.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang				20 Desa	20 Desa	20 Desa		20 Desa	20 Desa	20 Desa	
5.1.6	Jumlah kelompok PKK aktif				20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok		20 Kelompok	20 Desa	20 Desa	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah .

Kecamatan Balong sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Balong masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- 2) Sistem kerja yang belum optimal;
- 3) keterbatasan SDM yang berkualitas;
- 4) Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi pelaksana teknis tugas camat.

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras

- Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang
- Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi :

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih. *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 , maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong merujuk pada **misi 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Ponorogo utamanya misi (4) maka Kecamatan Balong memantapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balong, perlu ditentukannya isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik belum bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

2.4. Terhadap Rancangan Awal RKPD

terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten

Ponorogo Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo . tersebut digambarkan pada tabel TC 31 . berikut :

TABEL TC 31
Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

Lembar..... dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Balong	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.919.700.830	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Balong	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.723.647.830,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balong	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun	100%	5.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balong	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun	100%	5.200.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balong	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 Dokumen	2.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balong	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 Dokumen	2.000.000,00	RKA, RKAP, DPA, DPAP, Perkin, Reviu Perkin, Renja, Renstra

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Kec. Balong	Jumlah Dokumen Laporam Capaian Kinerja yang disusun	17 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Kec. Balong	Jumlah Dokumen Laporam Capaian Kinerja yang disusun	17 Dokumen	3.200.000,00	LKj
1.2.	Administrasi Keuangan	Kec. Balong	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	1.675.753.000	Administrasi Keuangan	Kec. Balong	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	1.528.950.000,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balong	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang Penerima	1.656.153.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balong	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang Penerima	1.507.750.000,00	Gaji
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Balong	Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan	4 Orang Penerima	18.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Balong	Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan	4 Orang Penerima	20.400.000,00	Penata Usahaan Keuangan
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balong	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu	5 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balong	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu	5 Dokumen	800.000,00	LRA,LO, NERACA, LPE, CALK
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Balong	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian		7.350.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Balong	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian		7.500.000,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Balong	Jumlah Penerimaa pakaian Dinas	20 Orang Penerima	7.350.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Balong	Jumlah Penerimaa pakaian Dinas	20 Orang Penerima	7.500.000,00	Pakaian Dinas
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Balong	Prosentase Administrasi Umum Perengkat Daerah yang terpenuhi	100%	113.470.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Balong	Prosentase Administrasi Umum Perengkat Daerah yang terpenuhi	100%	104.513.257,00	

1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balong	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2.079.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balong	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2.079.200,00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Balong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1420 Surat	25.667.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Balong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1420 Surat	5.500.000,00	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Balong	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Minuman Harian dan Jumlah ATK yang tersedia	20 Penerima 1 Paket	63.614.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Balong	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Minuman Harian dan Jumlah ATK yang tersedia	20 Penerima 1 Paket	74.562.257,00	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Balong	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	2.970.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Balong	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	2.087.800,00	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Balong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	5 Rakpr	19.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Balong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	5 Rakpr	20.284.000,00	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balong	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balong	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.751.923,00	

1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Balong	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1420 Surat	1.760.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Balong	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1420 Surat	1.319.900,00	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balong	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	13.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balong	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	13.432.023,00	Telepon, Internet, Listrik, Air
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balong	Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	102.226.930	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balong	Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	62.732.650,00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Balong	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	5 Unit	45.648.930	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Balong	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	5 Unit	45.647.350,00	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balong	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 Unit	4.078.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balong	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 Unit	4.585.300,00	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balong	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	52.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balong	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	12.500.000,00	Rumah Dinas dan Gedung Kantor
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Balong	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	150 Responden	117.883.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Balong	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	150 Responden	118.133.800,00	

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balong	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100%	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balong	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100%	89.410.000,00	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balong	1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 3. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	3 Event 20 Kelompok 20 Desa	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balong	1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 3. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	3 Event 20 Kelompok 20 Desa	89.410.000,00	HUT RI, Grebeg Suro, Hari Jadi ,Kec. Sehat
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Balong	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun	100%	23.473.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Balong	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun	100%	5.000.000,00	

2..2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Balong	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	1 SPP 41 SOP 210 surat	23.473.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Balong	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	1 SPP 41 SOP 210 surat	5.000.000,00	Pelayanan Umum
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Balong	Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	89.410.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Balong	Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	23.723.800,00	
2.3.1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Balong	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	2 Unit	89.410.000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Balong	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	2 Unit	23.723.800,00	Petugas CS
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Balong	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya	80%	10.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Balong	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya	80%	10.000.000,00	

3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Balong	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Loma Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten	1 Desa 1 Desa	10.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Balong	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Loma Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten	1 Desa 1 Desa	10.000.000,00	
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balong	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	20 Desa 20 Desa	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balong	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	20 Desa 20 Desa	10.000.000,00	Lomba Desa, BBGRM
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Balong	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	80%	31.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Balong	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	80%	13.800.000,00	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Balong	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	31.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Balong	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	13.800.000,00	

4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Balong	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	3 Fasilitasi	24.200.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Balong	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	3 Fasilitasi	6.600.000,00	FKUB
4.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Kec. Balong	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	20 Desa	7.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Kec. Balong	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	20 Desa	7.200.000,00	Hr Dan Ramil dan Kapolsek
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Balong	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	48.075.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Balong	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	60.750.400,00	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Balong	Prosentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100%	48.075.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Balong	Prosentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100%	60.750.400,00	

5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Balong	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	60 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Balong	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	60 Dokumen	4.000.000,00	PERDES/ PERKADES
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Balong	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	4.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Balong	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	4.000.000,00	DD/ADD
5.1.3	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Balong	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang undangan	20 Fasilitasi	14.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Balong	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang undangan	20 Fasilitasi	12.125.400,00	Clinik Hukum

5.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balong	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor 4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	3.025.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balong	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor 4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	3.025.000,00	FKPSB
5.1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Balong	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	20 Desa	9.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Balong	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	20 Desa	9.000.000,00	Musrenbang Kec.
5.1.6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Balong	Jumlah kelompok PKK aktif	20 Kelompok	14.050.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Balong	Jumlah kelompok PKK aktif	20 Kelompok	28.600.000,00	PKK
JUMLAH					2.127.058.830					1.926.332.030,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas sektor. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Ponorogo.

Usulan Program dan Kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang Mekanisme diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dukuh dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang akan dibawa ke forum Musrenbangdes, dari Forum Musrenbangdes menghasilkan sekala prioritas usulan yang akan di sampaikan ke Forum Musrenbang di Tingkat Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan merupakan sekala prioritas Program/kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat daerah yang ada di Kecamatan Balong

Uraian dari kajian tersebut adalah sebagaimana tabel TC 32 sebagai berikut :

TABEL TC 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	DESA : BALONG				
1	Pengerasan Jalan - Jl. Raharjo (Poros Desa)	RT 01 RW 02 Sidomulyo	Panjang jalan yang dibangun	650 M x 3 M	Pengerasan Jalan (Hot Mix)
2	Pengerasan Jalan - Jl. Widodo (Poros Desa) Pengerasan Jalan	RT 01 RW 01 Sidomulyo	Panjang jalan yang dibangun	1.000 m x 3 m	Pengerasan Jalan (Hot Mix)
3	Gapura Taman Bermain - Lapangan Jepun	RT 02 RW 01 Sumber Agung	Panjang jalan yang dibangun	Rp. 200.000.000	Pemburasan jalan
4	Talud Jalan Usaha Tani (JUT) Jepun Ke utara (Katiyah)	RT 01 RW 01 Sumber Agung	panjang talud yang dibangun	550 meter	Fasilitas Umum
5	Gedung Olah Raga Terpadu Kompleks Lapangan Jepun	RT 02 RW 01 Sumber Agung	Jumlah Gedung Olah Raga	Rp. 1.500.000.000	Fasilitas Olahraga
6	Rehap Gedung BUMDes	RT 01 RW 02 Sukomulyo	Jumlah Gedung BUMDes	Rp. 500.000.000	Pengembangan BUMDES
7	Jembatan Antar Desa (Balong - Bajang)	RT 01 RW 02 Sumber Agung	Luas Jembatan yang dibangun	25 X 4 M	Pembangunan Jembatan

2	DESA : SINGKIL				
1	Jalan	RT. 003 RW. 002 Nglongop	Panjang jalan yang dibangun	500x1x0,12m	Rabat Pelebaran Jalan kanan kiri
2	Drainase	RT. 001 RW. 001 Krajan	Panjang drainase yang dibangun	700x0,70x1m	Drainase jalan sebelah kiri
3	Jalan	RT. 001 RW. 001 Nglongop Krajan	Panjang jalan yang dibangun	1,500x5x0,5m	Pemburasan jalan
4	Gedung	RT. 001 RW. 001 Krajan	Luas Gedung yang dibangun	16x20m	Rehab Balai Desa
5	Gedung	RT. 001 RW. 001 Krajan	Luas Gedung yang dibangun	6x12m	Gedung PAUD
6	Gedung	RT. 001 RW. 001 Krajan	Luas Gedung yang dibangun	6x10m	Rehab Gedung Polindes
7	Jembatan	RT. 001 RW. 001 Krajan	Luas Jembatan yang dibangun	10x4m	Rehab Jembatan Jl. Brawijaya
3	DESA : BAJANG				
1	Rabat Jalan mawar	RT. 01 RW. 02 Taro	Panjang jalan yang dibangun	800x1x0,12 M	Rabat Jalan Mawar
		RT. 03 RW. 02 Taro	Panjang jalan yang dibangun		
2	Jembatan Dukuh Dopleng	RT. 02 RW. 02 Dopleng	Panjang jembatan yang dibangun	20m	Pembangunan Jembatan
3	Pengaspalan Jalan Dahlia	RT. 01 RW. 01 Dopleng	Panjang jalan yang dibangun	800 x3x0,5M	Buras Aspal Homix
4	Pengaspalan Jalan Kenongo	RT. 01 RW. 01 Butung	Panjang jalan yang dibangun	900x3x0,5 M	Buras aspal hotmiix
5	Pengaspalan Jalan Marikangen	RT. 01 RW. 01 Butung	Panjang jalan yang dibangun	350x3x0,5 m	Buras aspal hotmiix
6	Normalisasi Sungai Jalan Kenongo	RT. 03 RW. 01 Butung	Luas Sungai yang dinormalisasi	900 x2x2M	Memperlancar Saluran air
7	Normalisasi Sungai Jalan Raya Bajang	RT. 03 RW. 01 Mantren	Luas Sungai yang dinormalisasi	800x3x2,5 M	Memperlancar saluran air

8	Penerangan Jalan Kenongo	RT. 01 RW. 01 Butung	Jumlah sarana Penerangan jalan yang dibutuhkan	23 Buah	Jalan menjadi terang
9	Penerangan Jalan Mawar	RT. 01 RW. 02 Taro	Jumlah sarana Penerangan jalan yang dibutuhkan	8 Buah	Jalan menjadi terang
4	DESA : NGENDUT				
1	RABAT	RT. 02 RW. 02 Jatimenggung Dukuh Puhgading	Panjang jalan yang dibangun	450m X 3m X 0,12m	
2	DRAENASE	RT. 02 RW. 02 Krawe	Luas Drainase yang dibangun	200m X0,8mX 0,30mX2	
3	ASPAL HOTMIX	RT. 02 RW. 02 Jalan Budjono Dukuh Krawe	Panjang jalan yang dibangun	500m X4m	
4	RABAT	RT. 02 RW. 02 Jalan Gajah Mada Dukuh Krajan	Panjang jalan yang dibangun	200m X1,2mX 0,30m	
5	RABAT	RT. 01 RW. 02 Krawe	Panjang jalan yang dibangun	1000m X1,mX 0,12mX2	
6	JEMBATAN	RT. 01 RW. 01 Jl. Jend Sudirman, Puhgading	Panjang jembatan yang dibangun	6mX3m	
5	DESA : DADAPAN				
1	Pelebaran Jembatan Kali Slahung	RT. 01 RW. 01 Dukuh Krajan	Panjang jembatan yang dibangun	25 M X 5 M	
2	Rabat Jl. Bendungan	RT. 01 RW. 01 Desa Dadapan	Panjang jalan yang dibangun	4.000 M	
3	Duiker	RT. 04 RW. 01 Dukuh Krajan		6 M X 2 M	
4	Pengaspalan Jl. Bendungan	RT. 04 RW. 01 Desa Dadapan	Panjang jalan yang dibangun	4.000 M	

5	Gapura Jalan Masuk	RT. 04 RW. 01 Dukuh Sempol	Jumlah gapuro yang dibangun	P 6M X L 2M X T 7	
6	DESA : NGUMPUL				
1	Talud Jalan	RT. 02 RW. 02 Krajan	Panjang Talud yang dibangun	300 M	
2	Pelebaran Jalan	RT. 02 RW. 01 Ngumpul Lor	Panjang jalan yang dibangun	750 M	
3	Pemeliharaan Jalan	RT. 02 RW. 01 Ngumpul Lor	Panjang jalan yang dibangun	750 M	
4	Pengaspalan Jalan	RT. 02 RW. 01 Ngumpul Lor	Panjang jalan yang dibangun	750 M	
5	Talud Jalan	RT. 02 RW. 01 Ngumpul Lor	Panjang Talud yang dibangun	250 M	
6	Talud Jalan	RT. 02 RW. 02 Sobo	Panjang Talud yang dibangun	50 M	
7	Rabat Cor	RT. 03 RW. 02 Wotan	Panjang jalan yang dibangun	50 M	
8	Talud Jalan	RT. 02 RW. 02 Wotan	Panjang Talud yang dibangun	200 M	
9	Drainase	RT. 01 RW. 01 Wotan	Panjang drainase yang dibangun	200 M	
10	Sumur Dalam	RT. 03 RW. 02 Wotan	Jumlah sumur dalam yang dibangun	100 M	
11	Reyog		Jumlah alat kesenian yang dibeli	1 Paket	
12	Rabat Cor	RT. 03 RW. 02 Wotan	Panjang jalan yang dibangun	250 M	
13	Talud Jalan	RT. 03 RW. 02 Wotan	Panjang Talud yang dibangun	250 M	
14	Pelebaran Jalan	RT. 03 RW. 02 Wotan	Panjang jalan yang dibangun	250 M	
15	Drainase	RT. 02 RW. 01 Sobo	Panjang drainase yang dibangun	500 M	

7	DESA : BULUKIDUL				
1	TALUD/ PENGAMAN BADAN JALAN	RT. 01 RW. 04 BULUKIDUL	Panjang Talud yang dibaangun	350 M	BARU
2	KIOS PASAR DESA	RT. 02 RW. 04 BULUKIDUL	Jumlah Kios yang dibangun	8 LOKAL	BARU
3	KANOPI PAUD	RT. 02 RW. 03 BULUKIDUL	Panjang Kanopi yang dibutuhkan	9 M X 4 M	BARU
4	TALUD/ PENGAMAN BADAN JALAN	RT. 02 RW. 01 BULUKIDUL	Panjang Talud yang dibaangun	300 M	BARU
8	DESA : KARANGPATIHAN				
1	TALUD	RT. 04 RW. 01 TANGGUNGREJO	Panjang Talud yang dibaangun	216M ³	FISIK
2	TALUD	RT. 03 RW. 01 KRAJAN	Panjang Talud yang dibaangun	216M ³	FISIK
3	ASPAL	RT. 02 RW. 02 TANGGUNGREJO	Panjang jalan yang dibangun	600M	FISIK
4	ASPAL	RT. 03 RW. 02 BENDO	Panjang jalan yang dibangun	3X1000M	FISIK
5	RABAT	RT. 04 RW. 02 BENDO	Panjang jalan yang dibangun	3X750M	FISIK
9	DESA : SEDARAT				
1	Jembatan Gantung	RT. 01 RW. 01Dkh. Krajan Ds. Sedarat	Panjang jembatan yang dibangun	24 x 2 Meter	Sarana perhubungan
2	Pemeliharaan berkala jalan poros Dari Desa Jelen s/d Desa Purworejo	RT. 01 RW. 01Dkh. Krajan Ds. Sedarat	Panjang jalan yang dibangun	800 x 3 Meter	Sarana Trasportasi
3	Normalisasi Sungai dari Desa Sedarat S/d Desa Tatung	RT. 01 RW. 01Dkh. Genuk Ds. Sedarat	Luas sungai yang dinormalisasi	900 x 3 Meter	Memperlancar aliran air
4	Perbaikan Tanggul Sungai DAS Solo di Wilayah Desa	RT. 01 RW.	Luas tanggul yang di	100 x 3 M	Pengaman tempat pemukiman

	Sedarat	01Dkh. Krajan Dkh. Kalimujur S/d Dukuh Genuk Ds. Sedarat	perbaiki		warga dan Area Pertanian
10	DESA : NGAMPEL				
1	Dranase/saluran jalan	RT. 02 RW. 02 Doyong Ngampel	Panjang Drainase yang dibangun	1 mx 0.35x150	belum ada salurannya
2	Pengaspalan holmit	RT. 03 RW. 02 Krajan Ngampel	Panjang jalan yang dibangun	6m x 3 m	jalan rusak
3	Jembatan	RT. 03 RW. 02 Krajan Ngampel	Panjang jembatan yang dibangun	6 m x 12 m	kontruksi jemabatan plengkung /aliran tersumbat
4	Pelebaran jembatan perempatan Ngampel	RT. 03 RW. 02 Grenteng Ngampel	Panjang jembatan yang dibangun	5 m x 6 m	Jembatan sempit/mengganu lalulintas
5	Talud Jalan Poros	RT. 05 RW. 01 Grenteng Ngampel	Panjang Talud yang dibaangun	1 m x 0.35 m x 200 m	belum ada penahan jalan
11	DESA : PANDAK				
1	PELEBARAN JEMBATAN DUKUH KRAJAN	RT. 02 RW. 02 Krajan	Panjang jembatan yang dibangun	6X15 M	Jembatan Sempit
2	PELEBARAN JEMBATAN DUKUH KRESEK	RT. 03 RW. 02 kresek	Panjang jembatan yang dibangun	6X20 M	Jembatan Sempit
3	PELEBARAN JEMBATAN DUKUH KATES	RT. 04 RW. 01 kates	Panjang jembatan yang dibangun	6X15 M	Jembatan Sempit
4	PEMBUATAN SUMUR DALAM UNTUK PERTANIAN DKH GUNDI	RT. 03 RW. 01 gundi	Jumlah Sumur pertanian yang dibangun		tidak adanya mata air untuk pengairan
5	PEMBUATAN SUMUR DALAM UNTUK PERTANIAN DKH KRESEK	RT. 03 RW. 02 kresek	Jumlah Sumur pertanian yang dibangun		tidak adanya mata air untuk pengairan
12	DESA : MUNENG				
1	Gedung	RT. 01 RW. 01 Tengah	Jumlah Gedung yang dibangun	18x20 m	Rehab Balai Desa

2	Gedung	RT. 01 RW. 01 Tengah	Jumlah Gedung yang dibangun	8x9 m	Gedung PAUD
3	Gedung	RT. 01 RW. 01 Tengah	Jumlah Gedung yang dibangun	7x10 m	Rehab Gedung Polindes
4	Jembatan	RT. 02 RW. 02 Krajan	Panjang jembatan yang dibangun	25x4 m	Jembatan aliran Das solo
5	Jembatan	RT. 01 RW. 02 Jabon	Panjang jembatan yang dibangun	25x4 m	Jembatan aliran Das solo
13	DESA : BULAK				
1	Jalan	RT. 02 RW. 02 Krajan	Panjang jalan yang dibangun	1000 x 2.5 m2	Pemburasan Jalan
2	Pagar	RT. 01 RW. 01 Krajan	Panjang Pagar yang dibangun	1 Titik	Pagar Makam Lanjutan
3	TPT	RT. 01 RW. 02 Asem Depok	Panjang Tanggul yang dibangun	1 Titik	Tanggul Penahan Tanah
4	Sumur	RT. 02 RW. 02 Krajan	Jumlah Sumur P2AT yang dibangun	1 Titik	Sumur P2T
5	Sumur	RT. 01 RW. 01 Asem Depok	Jumlah Sumur P2AT yang dibangun	1 Titik	Sumur P2T
14	DESA : TATUNG				
1	Aspal Hot Mix Jalan Raya Tatung	RT. 02.01 RW. 02TATUNG	Panjang jalan yang dibangun	500 m x 4 m	Aspal rusak
2	Aspal Jalan Kresna - Jl. Arjuna	RT. 01,'02,03,04 RW. 02TATUNG	Panjang jalan yang dibangun	750 m x 2.5 m	Aspal rusak
3	Talud jalan Arjuna	RT. 01,'02,03,04 RW. 02TATUNG	Panjang Talud yang dibaangun	500 m x 0.80	Talud Jalan Rusak
4	Talud jalan usaha tani sawah Etan	RT. 01,'02 RW. 01TATUNG	Panjang Talud yang dibaangun	500 m	Jalan menyempit/tergerus
5	Jalan Wisata paralayang Tatung Tengah	RT. 01 RW. 02TATUNG	Panjang jalan yang dibangun	500 m x 3 m	Jalan Baru
15	DESA : NGRAKET				

1	Pembangunan Kantor BUMDesa	RT. 01 RW. 01 Krajan	Jumlah kantor BUMDes yang dibangun	45 M2	Pembangunan Kantor BUMDesa
2	Pembangunan Talut Penahan Lapangan Desa	RT. 01 RW. 01 Krajan	Panjang Talud yang dibaangun	150 M3	Pembangunan Talut Penahan Lapangan Desa
3	Pembangunan gapuro masuk Desa	RT. 02 RW. 01 Krajan	Luas Gapuro yang dibangun	192 M3	Pembangunan gapuro masuk Desa
4	Pembangunan Talut pagar makam Desa	Krajan, Jugil, Karang Kepuh	Panjang Talud yang dibaangun	105 M3	Pembangunan Talut pagar makam Desa
5	Pembangunan Sarana Olahraga Desa	RT. 01 RW. 01 Krajan	Jumlah sarana olah raga yang dibangun	120 M2	Pembangunan Sarana Olahraga Desa
16	DESA : SUMBEREJO				
1	Talut/tanggul	RT. 02 RW. 02 Sabet	Panjang Talud yang dibaangun	1500x2.5x40m	Talut/Tanggul Sungai Codot RT.02/RW.02.S/d Perbatasan Ds. Karang patihan
17	DESA : JALEN				
1	Pemeliharaan berkala jalan poros Dari Desa Jelen s/d Desa Purworejo	RT. 01 RW. 01 Jalen	Panjang jalan yang dibangun	4m x 550m	Aspal ready mix
2	Peningkatan Jl. Jend. Sudirman	RT. 01 RW. 01 Jalen	Panjang jalan yang dibangun	4m x 550m	Aspal ready mix
		RT. 02 RW. 01 Jalen	Panjang jalan yang dibangun		Aspal ready mix
		RT. 03 RW. 02 Jalen	Panjang jalan yang dibangun		Aspal ready mix
3	Peningkatan Jl. Gajah Mada	RT. 04 RW. 02 Jalen	Panjang jalan yang dibangun	3,6m X 1500m	Aspal ready mix
		RT. 03 RW. 02 Medelan	Panjang jalan yang dibangun		Aspal ready mix
		RT. 04 RW. 02 Medelan	Panjang jalan yang dibangun		Aspal ready mix
4	Pembangunan Jembatan Gantung	RT. 02 RW. 01 Jalen	Panjang jembatan yang dibangun	2m x 30m	Pembangunan Jembatan

		RT. 04 RW. 02 Medelan	panjang talud yang dibangun		Talud Penahan bahu Jalan
5	Rehab saluran irigasi	RT. 03 RW. 02 Medelan	Panjang Saluran irigasi yang dinormalisasi	1m x 1,5m X 750m	Normalisasi saluran Irigasi
		RT. 03 RW. 02 Jalen	Panjang Saluran irigasi yang dinormalisasi		Normalisasi saluran Irigasi
18	DESA : KARANGAN				
1	Jalan	RT. 002 RW. 002 Glagah	Panjang jalan yang dibangun	400x1x0,12m	Pelebaran Jalan kanan kiri dan Pengaspalan Jl.Kemajuan
2	Jembatan	RT. 002 RW. 002 Glagah	Panjang jembatan yang dibangun	6x6 m	Rehab Jembatan Jl. Kemajuan
3	Jalan	RT. 002 RW. 002 Glagah	Panjang jalan yang dibangun	80x2,5 m	Peninggian Jalan Masuk ke SMAN I Balong
4	Jalan	RT. 003 RW. 003 Karang	Panjang jalan yang dibangun	550x4,5 m	Pengaspalan Jalan jl Keluhuran dan jl.Kamukten
19	DESA : KARANGMOJO				
1	Pembangunan Kantor Desa	RT. 01 RW. 01 Gajah biru		50 m2	Pengadaan Kantor Desa Baru
2	Pembangunan HotMix jalan Poros	RT. 02 RW. 02 Gajah biru	Panjang jalan yang dibangun	2000 m2	Pengerasan jalan Poros
3	Pembangunan Balai Desa	RT. 01 RW. 01 Gajah biru		100 m2	Rehab balai desa
20	DESA : PURWOREJO				
1	Pemeliharaan berkala jalan poros Dari Desa Jelen s/d Desa Purworejo		Panjang jalan yang dibangun		
2	Peningkatan Jalan Parikesit	Jalan Parikesit Purworejo	Panjang jalan yang dibangun	800 x 4 m	Peningkatan Jalan Parikesit
3	Talud Jalan (Ngampel - Muneng)	Jalan Ngampel-Muneng	Panjang Talud yang dibangun	500 x 1 m	Talud Pengaman Jalan

4	Talud Sungai Katir	Jalan Tirtosari Dkh Klepu	Panjang Talud yang dibaangun	1460 x 2,5 m	Talud Pengaman Jalan
5	Peninggian Talud Jalan Parikesit	Jalan Parikesit Purworejo	Panjang Talud yang dibaangun	200 x 0,5 m	Peninggian Talud
6	Urug Lapangan	RT. 02 RW. 01 Dukuh Klepu		800 m3	Pengurangan Lapangan
SKPD : BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BALONG					
1	PENGADAAAN BKB KIT	20 Desa	Jumlah BKB KIT yang dibeli	20X 3.700.000,-	MENINGKATKAN TUMBUH KEMBANG BALITA
2	PENGADAAN KKA (KARTU KEMBANG ANAK)	20 Desa	Jumlah KKA yang dibeli	20x50x7.000,-	MENINGKATKAN TUMBUH KEMBANG BALITA
SKPD : SMPN I BALONG					
1	Rehabilitasi WC Siswa	RT 03 RW 02 Karang	Jumlah Sarpras Sekolah yang direhab	2 Unit	Kerusakan diatas 50 %
2	Kantor TU	RT 03 RW 02 Karang	Jumlah Sarpras Sekolah yang direhab	1 Unit (10x25m)	Kerusakan 40 %

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Balong dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien .
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang, dan
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan memjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Balong dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah letak geografis Kecamatan Balong yang berada di Wilayah Selatan menuju Kabupaten Pacitan sangat baik dari sisi Pertanian, Perekonomian dan Sosial Budaya, serta Pariwisata.

Sebagai Jalur Utama menuju Kabupaten Pacitan, Kecamatan Balong juga mempunyai Potensi Wisata yaitu Air Terjun Kedung Mimang di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan dan Situs Budaya Patirtan Ndoro Den Panji di Dusun Bendo Wilayah Desa Karangpatihan, Wisata Alam Gunung Beruk di Desa Karangpatihan, Wisata bukit Bobrok di Desa Ngumpul, wisata Kedung Air Terjun Kedung Lesung, Wisata Alam Bukit Teletabis di Desa Pandak dan yang terakhir Wisata Paralayang di Gunung Gede Desa Tatung .

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Balong, Produk perkebunan Tembakau di Desa Dadapan, Sedarat, Purworejo, Tatung dan Jalen. Sedangkan untuk Budidaya Tanaman Sayur sayuran dan Toga yang paling banyak di Desa Sedarat dan Jalen disamping desa desa lainnya juga ada. Sedangkan potensi industri rumah tangga berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Balong serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Balong yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2021-2026.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Balong mempunyai *tujuan* :

“Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan“.

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun *Sasarannya* adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditentukan Indikator sebagai berikut:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi ;
2. Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Balong adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut pada Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019, yang dilakukan Kecamatan Balong adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum;Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan.
- c. . Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah ;
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional;
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tabel perumusan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji dalam lampiran tabel TC 33 sebagai berikut :

TABEL TC 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun.2023
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

Lembar..... dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN								
	KECAMATAN BALONG								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Balong	100%	1.723.647.830,00	APBD		100%	2.022.455.607,00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun	Kec. Balong	100%	5.200.000,00	APBD		100%	5.200.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kec. Balong	8 Dokumen	2.000.000,00	APBD		8 Dokumen	2.000.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Kec. Balong	17 Dokumen	3.200.000,00				3.200.000,00

7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Kec. Balong	100%	1.528.950.000,00	APBD		100%	1.827.757.777,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balong	17 Orang Penerima	1.507.750.000,00				1.806.557.777,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan	Kec. Balong	4 Orang Penerima	20.400.000,00				20.400.000,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu	Kec. Balong	5 Dokumen	800.000,00	APBD		5 Dokumen	800.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	Kec. Balong		7.500.000,00				7.500.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerimaa pakaian Dinas	Kec. Balong	20 Orang Penerima	7.500.000,00	APBD		20 Oraang Penerima	7.500.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kec. Balong	100%	104.513.257,00	APBD		100%	104.513.257,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Balong	1 Paket	2.079.200,00	APBD		1 Paket	2.079.200,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Balong	1420 Surat	5.500.000,00	APBD		1425 Surat	5.500.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Minuman Harian dan Jumlah ATK yang tersedia	Kec. Balong	20 Penerima 1 Paket	74.562.257,00	APBD		20 Penerima 1 Paket	74.562.257,00

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Balong	1 Paket	2.087.800,00	APBD		1 Paket	2.087.800,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kec. Balong	5 Rakpr	20.284.000,00	APBD		5 Rakpr	20.284.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balong	100%	14.751.923,00	APBD		100%	14.751.923,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	Kec. Balong	1420 Surat	1.319.900,00	APBD		1420 Surat	1.319.900,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	Kec. Balong	12 Laporan	13.432.023,00	APBD		12 Laporan	13.432.023,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	Kec. Balong	100%	62.732.650,00	APBD		100%	62.732.650,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kec. Balong	5 Unit	45.647.350,00	APBD		5 Unit	45.647.350,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Kec. Balong	5 Unit	4.585.300,00	APBD		5 Unit	4.585.300,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. Balong	2 Unit	12.500.000,00	APBD		2 Unit	12.500.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	Kec. Balong	150 Responden	118.133.800,00			150 Responden	118.133.800,00

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	Kec. Balong	100%	89.410.000,00	APBD		100%	89.410.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya AktifJumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 3. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	Kec. Balong	3 Event 20 Kelompok 20 Desa	89.410.000,00	APBD		3 Event 20 Kelompok 20 Desa	89.410.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun	Kec. Balong	100%	5.000.000,00	APBD		100%	5.000.000,00
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3.Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	Kec. Balong	1 SPP 41 SOP 210 surat	5.000.000,00	APBD		1 SPP 41 SOP 210 surat	5.000.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. Balong	100%	23.723.800,00	APBD		100%	23.723.800,00
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	Kec. Balong	2 Unit	23.723.800,00	APBD		2 Unit	23.723.800,00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya	Kec. Balong	80%	10.000.000,00			80%	10.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten	Kec. Balong	1 Desa 1 Desa	10.000.000,00	APBD		1 Desa 1 Desa	10.000.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	Kec. Balong	20 Desa 20 Desa	10.000.000,00	APBD		20 Desa 20 Desa	10.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	Kec. Balong	80%	13.800.000,00			80%	13.800.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kec. Balong	100%	13.800.000,00	APBD		100%	13.800.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kec. Balong	3 Fasilitasi	6.600.000,00	APBD		3 Fasilitasi	6.600.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kec. Balong	20 Desa	7.200.000,00	APBD		20 Desa	7.200.000,00

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Balong	100%	60.750.400,00			100%	60.750.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Kec. Balong	100%	60.750.400,00	APBD		100%	60.750.400,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	Kec. Balong	60 Dokumen	4.000.000,00	APBD		60 Dokumen	4.000.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	Kec. Balong	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	4.000.000,00	APBD		20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	4.000.000,00
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang undangan	Kec. Balong	20 Fasilitasi	12.125.400,00	APBD		20 Fasilitasi	12.125.400,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor	Kec. Balong	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588 .163 34.748 SPPT	3.025.000,00	APBD		1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.58 8.163 34.748 SPPT	3.025.000,00

		4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan							
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	Kec. Balong	20 Desa	9.000.000,00	APBD		20 Desa	9.000.000,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	Kec. Balong	20 Kelompok	28.600.000,00	APBD		20 Kelompok	28.600.000,00
	JUMLAH				1.926.332.030,00				2.225.139.807,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Balong mengacu .Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Program-program Kecamatan Balong pada Tahun 2022 untuk mendukung Misi Kabupaten Ponorogo khususnya **4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 . Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Balong dapat dilihat sebagaimana berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN					
01	BIDANG URUSAN KECAMATAN					
	KECAMATAN BALONG					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Balong	100%	1.723.647.830,00	APBD
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun	Kec. Balong	100%	5.200.000,00	APBD
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kec. Balong	8 Dokumen	2.000.000,00	APBD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Kec. Balong	17 Dokumen	3.200.000,00	APBD
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Kec. Balong	100%	1.528.950.000,00	APBD
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balong	17 Orang Penerima	1.507.750.000,00	APBD
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa administrasi Keuangan	Kec. Balong	4 Orang Penerima	20.400.000,00	APBD
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu	Kec. Balong	5 Dokumen	800.000,00	APBD

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	Kec. Balong		7.500.000,00	APBD
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerima pakaian Dinas	Kec. Balong	20 Orang Penerima	7.500.000,00	APBD
7.01.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kec. Balong	100%	104.513.257,00	APBD
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Balong	1 Paket	2.079.200,00	APBD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Balong	1420 Surat	5.500.000,00	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Minuman Harian dan Jumlah ATK yang tersedia	Kec. Balong	20 Penerima 1 Paket	74.562.257,00	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Balong	1 Paket	2.087.800,00	APBD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kec. Balong	5 Rakpr	20.284.000,00	APBD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balong	100%	14.751.923,00	APBD
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	Kec. Balong	1420 Surat	1.319.900,00	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	Kec. Balong	12 Laporan	13.432.023,00	APBD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	Kec. Balong	100%	62.732.650,00	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kec. Balong	5 Unit	45.647.350,00	APBD
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Kec. Balong	5 Unit	4.585.300,00	APBD
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. Balong	2 Unit	12.500.000,00	APBD
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	Kec. Balong	150 Responden	118.133.800,00	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	Kec. Balong	100%	89.410.000,00	APBD
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif 3. Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 4. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	Kec. Balong	3 Event 20 Kelompok 20 Desa	89.410.000,00	APBD
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun	Kec. Balong	100%	5.000.000,00	APBD
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	Kec. Balong	1 SPP 41 SOP 210 surat	5.000.000,00	APBD
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. Balong	100%	23.723.800,00	APBD
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	Kec. Balong	2 Unit	23.723.800,00	APBD
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya	Kec. Balong	80%	10.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten	Kec. Balong	1 Desa 1 Desa	10.000.000,00	APBD
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	Kec. Balong	20 Desa 20 Desa	10.000.000,00	APBD
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya	Kec. Balong	80%	13.800.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kec. Balong	100%	13.800.000,00	APBD
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kec. Balong	3 Fasilitasi	6.600.000,00	APBD

	dan Nasional					
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kec. Balong	20 Desa	7.200.000,00	APBD
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Balong	100%	60.750.400,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Kec. Balong	100%	60.750.400,00	APBD
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	Kec. Balong	60 Dokumen	4.000.000,00	APBD
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	Kec. Balong	20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa	4.000.000,00	APBD
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peranturan Perundang undangan	Kec. Balong	20 Fasilitasi	12.125.400,00	APBD
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor 4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan	Kec. Balong	1 Kasus 20 Desa Rp. 2.235.588.163 34.748 SPPT	3.025.000,00	APBD
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	Kec. Balong	20 Desa	9.000.000,00	APBD
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	Kec. Balong	20 Kelompok	28.600.000,00	APBD
	JUMLAH				1.926.332.030,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balong tahun 2022 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balong 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balong dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2022 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparasi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Balong

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2022 , Camat Balong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Balong tahun 2022 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Balong setiap sub kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)” Amien.

Balong, 22 Oktober 2021

CAMAT BALONG



SETYA ANTARI, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19710110 199101 2 001